

**KONTRUKSI MAKNA KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI
KOMUNIKATOR POLITIK BAGI ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN
DPRD PROVINSI RIAU PERIODE 2014-2019**

Nova Yohana, Welly Wirman, Genny Gustina Sari
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik yang dapat ditempuh melalui keterwakilan perempuan dalam politik. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagaimana yang ditetapkan pemerintah merupakan wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi bagi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 jumlah anggota legislatif perempuan adalah delapanbelas (18) orang dari 85 orang anggota legislatif. Hal ini menggambarkan adanya partisipasi atau kemauan para perempuan di Riau untuk melakukan pelibatan di arena politik yang lebih didominasi laki-laki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motif anggota legislatif perempuan dalam keterlibatannya pada dunia politik di tengah tradisi budaya patriarki dan pemaknaan mereka mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ini terdiri dari 5 orang anggota legislatif perempuan, 2 orang ketua fraksi, dan wakil ketua DPRD Provinsi Riau dengan teknik purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi anggota dewan perempuan dalam keterlibatannya di ranah politik adalah motif karena (because motive) meliputi, dorongan keluarga, diusung partai, hobi organisasi, dan adanya jiwa aktivis. Motif tujuan/harapan (in order to motive) informan meliputi menghilangkan intimidasi dari berbagai pihak kepada perempuan untuk pengambilan keputusan, memaksimalkan perjuangan dan fungsi perempuan dalam membuat kebijakan, dan semakin menunjukkan kredibilitas perempuan dengan kinerja yg baik, profesional dan percaya diri. Pemaknaan anggota legislatif perempuan mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik terdiri dari kategori makna idealis sosial dan makna realistik sosial.

Kata Kunci ; **Kontruksi Makna, Keterwakilan perempuan, Komunikator Politik, Fenomenologi**

PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan dalam pentas politik Indonesia, mulai bergeliat sejak digulirkannya reformasi. Banyak potensi-potensi dari unsur perempuan perempuan Indonesia yang mulai keikutsertaannya dalam menempatkan diri di ruang politik menjadi patner dan mengimbangi keberadaan kaum laki-laki. Bahkan, kaum perempuan kerap kali mampu mewarnai gerakan politik yang dilakukan, sehingga eksistensi perempuan mulai menjadi figur baru dalam konstelasi politik yang terus berkembang, terutama dalam momentum Pemilu dimana banyak kaum perempuan tampil sebagai calon legislatif.

Kehadiran anggota legislatif perempuan dinilai penting dalam mengisi pembangunan, terlebih untuk memperjuangkan kaumnya, karena perempuan dianggap lebih mengetahui masalah kaum ibu. Selain itu, keberadaan anggota parlemen perempuan dianggap strategis, mengingat permasalahan bangsa saat ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh anggota parlemen laki laki. Perempuan yang selama ini dikenal berada di luar ring politik, pada gilirannya telah mampu secara perlahan menjadi bagian penting dari proses politik kepemimpinan yang terjadi, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.

Peluang dan partisipasi perempuan dalam pentas politik formal untuk memasuki ranah legislatif, diawali hadirnya kebijakan affirmative sejak Pemilu 2004 yang dimuat pada ayat 1 pa sal 65 U ndang-Undang No.12 tahun 2003 unt uk dinominasikan dalam memperebutkan kursi. Selanjutnya pada Undang-Undang No. 2 tahun 2008, t elah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol. Sementara pada Undang-Undang No. 10 t ahun 2008, memiliki prinsip yang sama yakni adanya affirmative action, yang menyatakan secara tegas harus mencapai 30% perempuan di parlemen. Pada Peraturan KPU No. 12 tahun 2012 t entang verifikasi Parpol Peserta Pemilu dalam Bab VII tentang pencalonan, pada pasal 55 secara tegas dinyatakan: Daftar Calon sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat 30% keterwakilan perempuan.

Dalam sejarah pemilihan umum, keterwakilan perempuan dalam parlemen dari pemilu ke pemilu memiliki angka yang rendah, walaupun pemerintah sudah melakukan terobosan melalui aksi afirmasi untuk tercapainya kuota 30%, sejak pemilu tahun 2004 dan pemilu 2009. Keterwakilan perempuan di tingkat nasional dan lokal, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten/Kota masih jauh dari harapan. Banyak faktor yang memengaruhi ketimpangan, selain rendahnya komitmen partai, rendahnya kepercayaan masyarakat dan partisipasi pemilih, juga persaingan antar calon.

Peran perempuan dalam percaturan politik di DPRD Provinsi Riau menunjukkan sedikit perubahan walau belum secara signifikan. Hal ini dapat dilihat

dari meningkatnya jumpalah partisipasi perempuan di DPRD provinsi Riau dua periode terakhir, yaitu periode 2009-2014 anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Riau hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, sedangkan pada periode 2014-2019 meningkat menjadi 18 (delapan belas) orang dari jumlah 65 kursi. Di antara 18 orang tersebut, Golkar merupakan partai terbanyak yang mengirimkan kader perempuannya di DPRD Riau, yang jumlahnya mencapai 7 orang (Nuraini, Karmila Sari, Sumiyanti, Sewitri, Septina Primawati, Sulastri, Supriati). Sementara Demokrat 3 orang (Eva Yuliana, Maghdalisni, Yulianti), PDI Perjuangan 2 orang (Almainis, Soniwati), PPP 2 orang (Yurnalis, Tengku Nazlah Khairati), Gerindra 1 orang (Lampita Pakpahan), PAN 1 orang (Ade Hartati Rahmat), PKS 1 orang (Mira Roza), NasDem 1 orang (Farida H Asad). Adapun 10 nama anggota DPRD Riau dari kalangan perempuan periode 2009-2014 yakni, Iwa Sirwani Bibra, Supriati, Rosvanilda Zulher, Sumiyanti, Elly Suryani (Golkar), Almainis (PDI Perjuangan). Selanjutnya, Tengku Nazlah Khairati (PPP), Mukhniarti (Demokrat), Lampita Pakpahan (PPRN), Gustini Julianti (PKB). Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan partisipasi atau kemauan para perempuan di Riau untuk melakukan pelibatan di arena politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya satu syarat luar belaka, bukan sebagai syarat atas nama demokrasi dan emansipasi. Semua itu harus diimbangi dengan hakikat mengapa harus ada keterwakilan perempuan dalam wilayah politik. Wacana keterwakilan perempuan dalam wilayah politik harus menjamin terhadap perubahan bangsa menuju satu tatanan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Lebih substansial melalui keterwakilan perempuan dalam politik adalah bagaimana visi, misi, dan komitmen kaum perempuan dalam turut serta membangun peradaban bangsa.

Mencermati dan memperhatikan pada hal-hal diatas maka penulis tertarik meneliti tentang kontruksi makna keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik oleh anggota legislative perempuan DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 di tengah arus budaya politik patriarkhi dimana masyarakat masih kurang responsif terhadap pemimpin perempuan. Melalui pendekatan fenomenologi tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap motif yang melatar belakangi anggota legislatif perempuan dalam keterlibatannya pada dunia politik di tengah tradisi budaya patriarkhi dan pemaknaan mereka mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislative. Dalam konteks fenomenologis, perempuan anggota legislative adalah actor yang melakukan tindakan sosial seperti membuat sejumlah peraturan-peraturan perundangan bersama actor lainnya sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaandalam ikatan makna intersubjektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikator Politik

Komunikasi politik menurut Denton dan Woodward (McNair, 1999: 3), “*public discussion about the allocations of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)*”. Intinya, komunikasi politik merupakan diskusi publik mengenai alokasi sumber daya public seperti pejabat yang memiliki kewenangan yaitu siapa yang memberikan kekuasaan untuk mengesahkan keputusan dari legislative maupun eksekutif dan pejabat yang berhak memberikan penghargaan dan hukuman, sehingga komunikasi politik adalah pembicaraan yang menyangkut tentang kekuasaan (*power*), legitimasi atau pengesahan (*legitimate*) dan kewenangan (*authority*). Nimmo (2005:16) menjelaskan bahwa komunikator politik ini adalah *pols* yakni politikus yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, kemudian *vols*, yaitu warga Negara yang aktif dalam politik berdasarkan paruh waktu (*part time*) dan sukarela (*voluntary*). Laswell (Suwardi, 1995:16) membagi komunikator politik secara umum, meliputi: (1) Politikus (*Pols*); (2) Komunikator profesional (*Pros*); (3) Aktivistis (*Vols*).

Lebih lanjut L.W. Dobb (Harun dan Sumarno, 2006: 55-57) menjelaskan tentang politikus (jamak) atau politisi (tunggal) bahwa dalam kenyataan empiris para politisi berada pada dua struktur politik, yaitu diinfrastruktur politik, (fungsi *input*), yaitu didalam lima katagori komunikator infrastruktur yang telah disebutkan di atas. Namun, yang paling bisa terdeteksi politikus berada di sebuah partai politik (parpol) karena kepentingan dan aktualisasinya lebih kongkrit atau istilahnya melakukan “politik praktis”. Daniel Katz (Nimmo, 2005 : 31) ada dua tipe politikus, yaitu:

1. Wakil rakyat atau partisan, ciri-cirinya mencari prestise, kemudahan kemudahan atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh kelompok
2. Ideologi atau *policy formulator*, yang memperjuangkan nilai-nilai seseorang untuk suatu perubahan dan pembaharuan secara revolusioner.

Keterwakilan Perempuan

Secara konseptual, “Keterwakilan Politik” berawal dari pemilu. Artinya pemilu yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa “keterwakilan politik” dikalangan masyarakat luas. Sebab pemimpin yang muncul di pusat kekuasaan disaring oleh pemilih. Begitu pula halnya jika pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menseleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis besar kepentingan mereka (Sanit, 1985 : 193-194).

Ada dua kategori yang dibedakan. Kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*funcional representation*). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengemban “mandat” perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. (Miriam, 1998 : 317).

Dalam Negara demokrasi keterwakilan perempuan merupakan bentuk Hak Asasi Manusia (HAM). Karena lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidakakan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan publik.

Jadi, keterwakilan perempuan secara fisik dan pemikiran dalam posisi penentu kebijakan sangat diperlukan dan diutamakan, maka apabila representasi di lembaga politik formal diserahkan kepada laki-laki sebagai wakil perempuan akan menghasilkan kondisi bias gender, yang disebabkan oleh sangat kecilnya peluang laki-laki yang bisa memperjuangkan hak perempuan karena laki-laki tidak mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan.

Konstruksi Makna

Konstruksi makna dapat dipahami sebagai sebuah proses ketika seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan atau objek disekitar mereka. Konstruksi makna juga dapat diartikan sebagai proses dengan mana orang mengorganisasikan dunia dalam perbedaan yang signifikan. Proses ini kemudian dijalankan melalui konstruksi kode-kode sosial, budaya, dan sejarah yang spesifik. Konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia. Ringkasnya konstruksi makna adalah produksi makna melalui bahasa, serta konsep konstruksi makna bisa berubah-ubah. Akan selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi yang disesuaikan dengan situasi yang baru. Makna adalah hasil praktek penandaan, praktek yang membuat suatu hal bermakna sesuatu.

Makna dari objek yang terdapat dalam dunia nyata dihasilkan melalui pengalaman individu dengan objek tersebut. Aliran konstruktivisme memahami

bahwa konsep dari makna yang dihasilkan oleh individu dikonstruksi berdasarkan kumpulan pengetahuan (*stock of knowledge*) individu yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya. Realitas dari sebuah objek nyata merupakan keterkaitan individu terhadap objek tersebut (Bungin, 2008:3).

Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, ‘phainomenon’ yaitu “yang menampak”. Fenomenologi pertama kali dicetuskan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir yang mempelajari fenomena manusiawi tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Tujuan utama fenomenologi ialah mempelajari bagaimana fenomena dialami alam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas (Kuswarno, 2009:2).

Alfred Schutz adalah ahli teori fenomenologi yang paling menonjol sekaligus yang membuat fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial hingga saat ini. Bagi Schutz, tugas utama fenomenologi ialah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi (Kuswarno, 2009: 110).

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran. Manusia mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. Hubungan antara makna pun diorganisasikan melalui proses ini, atau biasa disebut *stock of knowledge*. (Kuswarno, 2009 : 18). Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang Schutz mengelompokkannya dalam dua fase, yaitu:

- a) *Because motives (Weil Motiv)*, yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya.

- b) *In-order-to-motive (Um-zu-Motiv)*, yaitu motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan paradigma penelitian yang digunakan, Untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kontruksi makna ketrwakilan perempuan sebagai komunikator politik bagi anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 dari sudut pandang mereka sendiri, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi. Metode penelitian kualitatif pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dan peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Makna tentang obyek yang diamati dalam penelitian ini dibawa oleh subyek penelitian yaitu anggota legislatif perempuan kepada peneliti.

Informan penelitian terdiri dari 5 orang anggota DPRD perempuan yang 2 orang ketua fraksi, dan wakil ketua DPRD Provisnsi Riau periode 2014-2019. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan (*observasi*) dan studi pustaka. Analisa data dilakukan dengan mereduksi berbagai pernyataan anggota legislatif tersebut sekaligus melakukan interpretasi terhadap kecenderungan-kecenderungan atas pendapat yang mereka kemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dialog dan pengamatan (*observasi*) oleh peneliti baik secara formal maupun informal di beberapa kesempatan seperti rapat dan kunjungan kerja maupun pertemuan insedentil dengan informan di tempat-tempat lainnya. Wawancara mendalam dan observasi dilakukan oleh peneliti secara intensif mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagaimana telah dibahas pada bab metodologi penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagaimana telah diungkapkan beberapa ahli (Bogdan dan Taylor, 1975:5), Bogdan dan Biglen, 1990:2, Miles dan Huberman, 1993:15, Moleong, 1993:5, Brannen, 1997:1) bahwa metode penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada pengamatan mendalam terhadap perilaku manusia dan lingkungannya. Untuk memperkuat hasil penelitian maka digunakan perspektif interpretif dengan pendekatan fenomenologi dari Alfred Schutz. Hasil penelitian ini memuat profil politisi perempuan dan realitas komunikasi politik politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau, dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi

Motif Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Riau Terlibat dalam Ranah Politik

Berkiprah di dunia politik bagi kelima perempuan anggota legislative Riau periode 2014-2019, bukan dilatarbelakangi oleh faktor euphoria politik atau ikut-ikutan semata. Tapi terjun ke dunia politik karena dorongan kuat yang ada pada dirinya untuk berbuat lebih banyak di areal public. Beragam latar belakang yang membentuk dan kemudian mengantarkan politisi perempuan melibatkan diri dalam ranah politik praktis dan tetap eksis tidak terlepas pula karena adanya motif yang mendasari keterlibatan informan menggeluti dunia politik. Dalam hal ini motif sebagai faktor-faktor yang ada dalam diri individu politisi perempuan yang menjadi subyek dalam penelitian ini mempengaruhi dan mendasari tindakan yang dilakukan yang berlangsung melalui proses berfikir secara sadar disadari oleh para informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengamatan maupun wawancara mendalam dengan 5 politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai informan dalam penelitian ini, dengan perspektif yang digunakan yaitu fenomenologi Alfred Scutz, ditemukan 2 kategori tentang motif informan melakukan tindakan dan perilaku dalam kapasitasnya sebagai politisi anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu motif karena (because motive) dan motif tujuan atau harapan (in order to motive)

Motif karena (because motive) sebagai motif yang menggambarkan alasan atau latar belakang yang mendasari tindakan informan sebagai politisi, penelitian terhadap 70 orang politisi perempuan di DPRD Provinsi Riau, hasilnya mengidentifikasi adanya motif informan terhadap dorongan untuk menjadi politisi tersebut ternyata dapat dikategorikan sebagai dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai dorongan yang kuat dengan segala eksistensinya yang melekat di dalamnya, serta dorongan yang muncul dari luar yang ternyata dorongan itu tidaklah sekuat dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Hal ini akan membawa suatu konsekuensi yang nyata terhadap semangat, niat yang sungguh-sungguh dan ambisi masing-masing politisi perempuan dalam setiap aktivitas selama masa rangkaian kinerja di DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019.

Jika ditinjau dari motif yang melatarbelakangi (because motif) informan untuk menjadi politisi perempuan yang duduk di lembaga legislative DPRD Provinsi Riau, peneliti mendapatkan jawaban yang beragam. Dari hasil wawancara dengan para informan tentang motif penggugah yang mendorong mereka berkecimpung di dunia politik sebagai politisi maka hasilnya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Motif Karena (*because motive*) Informan menjadi Politisi

No	Motif Karena (<i>because motive</i>)	Informan
1	Dorongan Keluarga	Farida dan Almainis
2	Diusung Partai	Mila Roza
3	Jiwa aktivis dan keinginan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan	Sumiyanti , Ade Hartati

Terkait dengan motif yang telah diuraikan oleh informan, tentang daya dorong yang melatarbelakangi informan menjadi politisi dalam penelitian ini, ditemukan pula adanya motif lain yaitu motif harapan. Motif harapan yang dimaksudkan sebagai suatu tujuan yang ingin di capai oleh informan politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Motif harapan sebagai suatu tindakan yang merujuk pada masa yang akan datang yang oleh Schutz disebut sebagai “*in order to motive*”. Motif harapan ini yang kemudian mempengaruhi dan menentukan segala tindakan informan sebagai politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau

Hasil penelitian terhadap 5 informan menunjukkan adanya keberagaman motif tujuan atau harapan informan yaitu, harapan bahwa peran serta mereka akan memberi kontribusi untuk memajukan kaum perempuan dan peran sertanya di dunia publik, harapan berkontribusi bagi terciptanya kehidupan politik yang sehat dan dinamis, serta harapan bahwa perempuan semakin percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Harapan yang menjadi tujuan utama sebagai motif harapan yang digambarkan dalam tindakan dan perilaku politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai informan dalam penelitian ini, sebagaimana paparan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Motif Harapan (*in order to motive*) Informan Sebagai Politisi Anggota DPRD

No	Motif	Informan
1	Harapan menghilangkan intimidasi dari berbagai pihak kepada perempuan untuk pengambilan keputusan	Almainis
2	Harapan memaksimalkan perjuangan dan fungsi perempuan dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak	Sumiyati

3	Harapan perempuan semakin menunjukkan kredibilitas dengan kinerja yg baik dan professional yang dimiliki dan percaya diri	Ade Hartati, Farida ,dan Mira
---	---	-------------------------------

Pemaknaan Keterwakilan Perempuan sebagai Komunikator Politik (Quota 30%) oleh Anggota Legislatif DPRD Provinsi Riau 2014-2019

Peran perempuan dalam perancangan politik di DPRD Provinsi Riau menunjukkan sedikit perubahan walau belum secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di DPRD provinsi Riau dua periode terakhir, yaitu periode 2009-2014 anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Riau hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, sedangkan pada periode 2014-2019 meningkat menjadi 18 (delapan belas) orang dari jumlah 65 kursi. Di antara 18 orang tersebut, Golkar merupakan partai terbanyak yang mengirimkan kader perempuannya di DPRD Riau, yang jumlahnya mencapai 7 orang (Nuraini, Karmila Sari, Sumiyanti, Sewitri, Septina Primawati, Sulastri, Supriati). Sementara Demokrat 3 orang (Eva Yuliana, Maghdalisni, Yulianti), PDI Perjuangan 2 orang (Almainis, Soniwati), PPP 2 orang (Yurnalis, Tengku Nazlah Khairati), Gerindra 1 orang (Lampita Pakpahan), PAN 1 orang (Ade Hartati Rahmat), PKS 1 orang (Mira Roza), NasDem 1 orang (Farida H Asad). Adapun 10 nama anggota DPRD Riau dari kalangan perempuan periode 2009-2014 yakni, Iwa Sirwani Bibra, Supriati, Rosvanilda Zulher, Sumiyanti, Elly Suryani (Golkar), Almainis (PDI Perjuangan). Selanjutnya, Tengku Nazlah Khairati (PPP), Mukhniarti (Demokrat), Lampita Pakpahan (PPRN), Gustini Julianti (PKB). Hal ini . menggambarkan bahwa ada peningkatan partisipasi atau kemauan para perempuan di Riau untuk melakukan pelibatan di arena politik.

Manusia merupakan makhluk dinamis yang bisa bebas menentukan pilihan perilaku. akan tetapi walaupun bebas, namun tetap terikat pada aturan dan hukum yang disepakati atas dasar pemaknaan bersama. Sesuatu tidak akan bermakna apa-apa ketika individu tidak memberikan makna apa-apa terhadap sesuatu itu. Dengan demikian makna tidak dapat berdiri dengan sendirinya karena individu adalah yang memberi makna.

Makna bersifat subyektif dan cair, makna tersebut berkembang dan disempurnakan melalui interaksi yang berlangsung. Makna atau pemaknaan merupakan akumulasi dari berbagai potensi dalam kehidupan seseorang dan bagaimana seseorang merespon sesuatu objek berdasarkan makna-makna yang dikandung komponen-komponen tersebut yang ditemui dilingkungan kehidupannya.

Pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik oleh politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini ditemukan memiliki

pemaknaan yang berbeda-beda. Pemaknaan informan tentang keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif secara umum bagi informan merupakan kesempatan yang akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang tidak mendapat perhatian selama ini di Indonesia. Misalnya Angka kematian Ibu yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya.

Keterwakilan perempuan 30 % akan membuat perempuan lebih berdaya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia yang masih rendah. Makna lain yang terungkap adalah bahwa. Keterwakilan perempuan minimal 30% akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget berspekpektif gender. Penggunaan analisa bersperspektif gender. Penggunaan analisa berperspektif gender akan meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang public juga akan memperhatikan perspektif gender tersebut. Oleh karena itu Pemaknaan informan tentang ketrwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lemabga legislative adalah bentuk tanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupan sosial bermasyarakat.

Dari penjelasan para informan tentang pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik oleh anggota DPRD Provinsi Riau bahwa informan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Perbedaan pemaknaan pada dasarnya dipengaruhi keunikan cara berfikir, dan latar belakang individu, pengalaman masa lalu dan pemahaman politisi perempuan yang kemudian diinterpretasikan secara berbeda dalam mengkonstruksi makna keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik. Konstruksi pemaknaan para informan tentang pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik yang dimaksudkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Pemaknaan Keterwakilan Perempuan sebagai Komunikator Politik

No	Pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik (quota 30%)	Informan
1	Memaknai sebagai kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dalam keterlibatan secara adil dalam posisi politik/bukan diskriminasi	Ade Hartati
2	Memaknai sebagai sarana yang menunjukkan hak representasi setara dan langkah maju bagi perempuan terjun ke dunia politik	Farida
3	Memaknai sebagai sarana yang menunjukkan	Mira Roza, Almainis

	pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik	
4	Memaknai sebagai ukuran kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang didominasi laki-laki	Sumiyanti

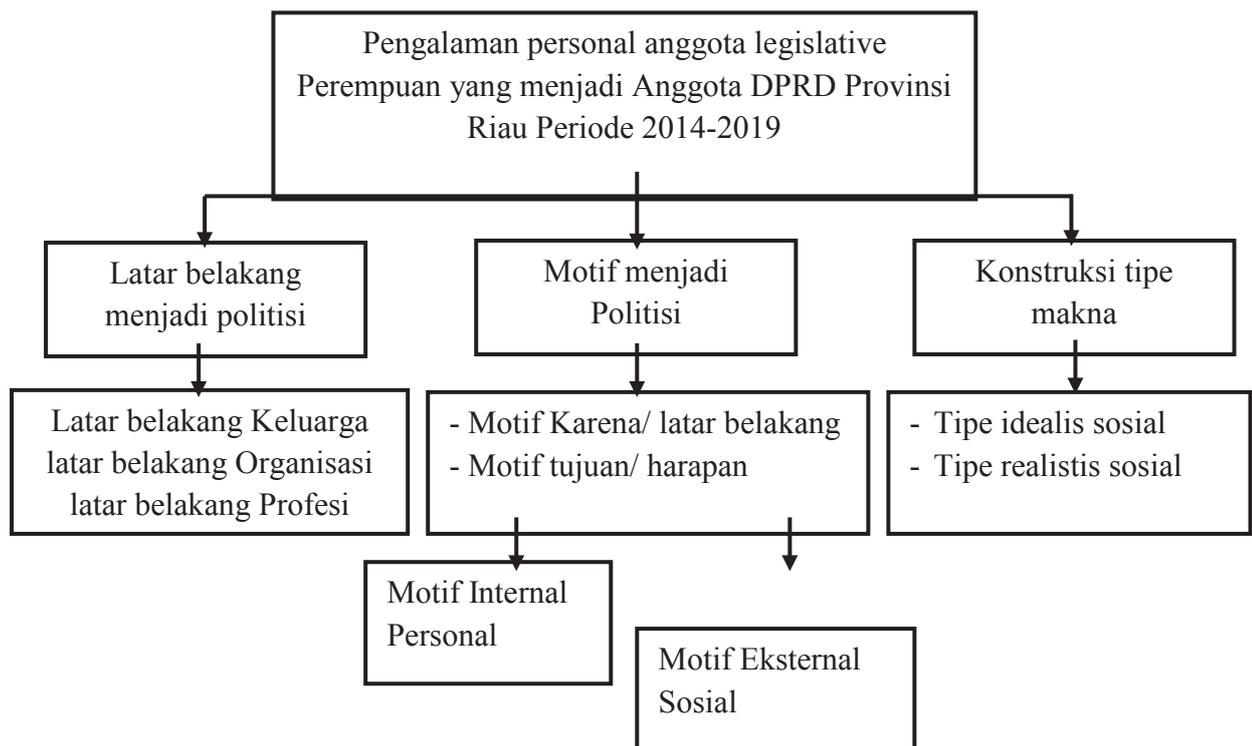
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dengan quota 30% ditemukan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Pemaknaan informan tentang keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dengan quota 30% secara umum bagi informan merupakan kompensasi atas hambatan-hambatan actual yang mencegah perempuan terlibat secara adil dalam posisi politik, dan bukan sebuah diskriminasi. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mempunyai hak representasi setara dalam mengakomodasi dan mengarahkan program-program pembangunan dan dimaknai sebagai peluang meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Makna lain yang terungkap adalah bahwa pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik. Di lain hal keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dengan quota 30% dimaknai sebagai sebuah ukuran yang menunjukkan meskipun kualitas perempuan dinilai sama dengan laki-laki namun kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalisasikan dalam sistem politik yang didominasi laki-laki.

Konstruksi pemaknaan informan tentang pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dikategorisasikan dalam sebelumnya dikategorisasikan dalam dua kategorisasi tipe makna. Tipe pertama adalah makna idealis sosial. Dalam pandangan tipe makna idealis sosial informan memaknai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif dengan quota 30% sebagai batasan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik menghadapi dominasi politik laki-laki dan menunjukkan kualifikasi perempuan masih rendah sehingga diminimalkan dalam sistem politik. Tipe kedua adalah tipe makna realistik sosial, pada tipe ini informan memaknai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif dengan quota 30% sebagai kesempatan/ peluang perempuan lebih maju untuk terjun ke dunia politik dan sebagai kompensasi hambatan-hambatan yang mencegah perempuan terlibat secara adil yang memberi kemudahan akses untuk mengakomodasi dan mengarahkan program-program pembangunan, dan kesempatan merealisasikan idealisme sebagai bentuk sosial kontrol terhadap jalannya roda pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat di daerah Provinsi Riau

Maka konstruksi pemaknaan informan berdasarkan kategorisasi tipe makna informan mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga

legislative DPRD Provinsi Riau sebagaimana telah diuraikan diatas dapat digambarkan dalam model seperti di bawah ini :

Gambar
Konstruksi tipe pemaknaan Keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik



PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontruksi makna keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik anggota legislative , studi fenomenologi politisi perempuan di DPRD Provinsi Riau, maka peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut : Motif politisi perempuan sebagai anggota DPRD provinsi Riau dilatarbelakangi oleh Motif karena (because motive) meliputi Dorongan keluarga Dorongan partai Dorongan jiwa aktivis dan keinginan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan. Adapun Motif tujuan (in order to motive): adalah harapan menghilangkan intimidasi dari berbagai pihak kepada perempuan untuk pengambilan keputusa, harapan memaksimalkan perjuangan dan fungsi perempuan dalam membuat

kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan harapan perempuan semakin menunjukkan kredibilitas dengan kinerja yg baik dan professional yang dimiliki dan percaya diri.

.Pemaknaan Keterwakilan Perempuan sebagai Komunikator Politik bagi Anggota Dewan Perempuan DPRD Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemaknaan yang berbeda-beda yakni; memaknai sebagai kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dalam keterlibatan secara adil dalam posisi politik/bukan diskriminasi, memaknai sebagai sarana yang menunjukkan pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik . memaknai sebagai sarana yang menunjukkan hak representasi setara dan langkah maju bagi perempuan terjun ke dunia politik .

Dari hal tersebut diatas disarankan Politisi perempuan hendaknya merekonstruksi motif yang mendasari keterlibatannya di ranah publik. Motif sebagai anggota DPRD hendaknya tidak hanya sebatas sebagai ajang pembuktian kemampuan menembus ranah publik semata, tetapi sejatinya diaktualisasikan melalui kinerja, dedikasi dan loyalitas yang optimal dan kapabel dalam melaksanakan fungsi dan perannya dengan kinerja yang nyata sebagai pengemban amanah rakyat. Eksistensi politisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen seyogyanya tidak hanya karena diuntungkan oleh wild card dari affirmative action dan sekedar sebagai pelengkap atau aksesoris politik dan pemanis ruang publik belaka, tetapi merupakan figure yang memiliki komitmen kuat untuk proaktif, responsive dan kapabel dalam penguasaan masalah, untuk memperkuat konstruksi dan bargaining position politiknya dalam perannya merumuskan, memutuskan dan mengawal keputusan atau kebijakan-kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta : CV.Rajawali
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Dan Nimmo. 2005. *Komunikasi politik; komunikator, Pesan, dan media*. Bandung: Rosdakarya
- Jalaludin Rakhmat, 2005, *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metode penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung 2005
- Harun, Rochajat, dan Sumarno. (2006). *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Juliastuti, Nuraini. 2000. *Mengontrol Perempuan. (Newsletter KunciMaskulinitas - 5832)*. Yogyakarta: KUNCI Cultural Studies Center. (Edisi 8 September 2000).
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*, Bandung : Widya Padjadjaran
- Mulyaha, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of the Social Word*. London: Heinemann Educational Book.
- Trafton, M. Barbara (1984), *Women Winning: How to Run For Office*, NJ, The Harvard Common Press
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wood, Julia T. 2004. *Communication Theories In Action*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- <http://eprints.undip.ac/9634>